



ANALISIS DAMPAK PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)

Reni May Susanti¹, Abdul Haris^{2*}, Agustina Pujiastutik³
Fakultas Ekonomi, Universitas Panca Marga¹²³
harisprof7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Serta Dampak Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana informan yang dipilih adalah masyarakat yang bisa menjawab. Berdasarkan hasil penelitian, Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri sendiri secara mandiri. Pembangunan Ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali di ukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Kemiskinan erat kaitannya dengan ketahanan pangan karena kemiskinan menyebabkan keterbatasan untuk mengonsumsi pangan. Maka dengan adanya bantuan sosial yang berupa Bantuan Pangan Non Tunai, mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan*

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the Analysis of Community Empowerment in Economic Development and the Impact on Poverty Level in Kademangan Subdistrict, Probolinggo City. The type of research used is qualitative research. Where the informants chosen are the people who can answer. Based on the results of the study, Empowerment is an effort to increase the abilities and potential possessed by a community so that they can actualize their true identity, desires and dignity to survive and develop themselves independently. Economic Development is efforts to improve the standard of living of a nation which is often measured by the level of real income per capita. Poverty is closely related to food security because poverty causes limitations to consume food. So with the social assistance in the form of Non-Cash Food Aid, able to reduce poverty levels.

Keywords: *Community Empowerment, Economic Development Against Poverty Level*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah memberikan dana stimulus melalui program-program yang digolongkan ke dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui pemberian dana yang dikategorikan sebagai dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) contohnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Siswa Miskin (BLSM), yang ditunjukkan bagi peningkatan kapasitas keberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, khususnya masyarakat miskin, dengan diluncurkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dalam pelaksanaannya, program-program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri yang memberikan harapan bagi kelangsungan hidup masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan dana melalui dana ekonomi produktif. Bertitik tolak pada pandangan kebijakan strategis tersebut, maka penanganan program-program pemberdayaan masyarakat (social envorement) seyogyanya juga harus diimbangi dengan memberikan perhatian khusus bagi pengembangan modal sosial.

Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri sendiri secara mandiri. Pembangunan Ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali di ukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dijabarkan adalah "Bagaimana Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Serta Dampak Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo".

2. TELAAH PUSTAKA

Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal yaitu Learning by doing, Problem solving, Self-evaluation, Self-development and coordination, Self-selection, dan Self-decisim. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting): mikro, mezzo, dan makro.

Pembangunan Ekonomi.

Pembangunan Ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping itu kebahagiaan penduduk akan bertambah pula karena pembangunan ekonomi tersebut menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Pembangunan ekonomi juga memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat perikemanusiaan, karena makin banyaknya sarana yang tersedia. Orang dapat diharapkan menolong orang lain kalau kebutuhan untuk dirinya sendiri telah banyak terpenuhi sehingga ada suatu surplus yang tersedia untuk orang lain yang menderita karena cacat, bencana alam atau miskin. Dampak dari Pembangunan Ekonomi, yaitu : Untuk mengurangi Tingkat Kemiskinan; Untuk mengembangkan Usaha Masyarakat; Menciptakan Lapangan Pekerjaan; Memperbaiki tingkat pendapatan; Menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tingkat Kemiskinan.

Tingkat Kemiskinan (poverty rate) adalah persentase pada populasi dengan keluarga yang pendapatannya berada pada tingkat absolut yang dinamakan garis kemiskinan (poverty line). Kemiskinan adalah penyakit ekonomi yang memengaruhi banyak negara, tetapi tidak memengaruhi semuanya dengan frekuensi yang sama. Berdasarkan dari jenisnya, ada 2 yaitu: Kemiskinan subjektif adalah kemiskinan yang berlaku secara individual. Kemiskinan jenis ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepemilikan sejumlah harta maupun dengan kemampuan mengeluarkan uang untuk mencapai kebutuhan dan kemiskinan objektif yang dapat di analisis karena ia merupakan gejala sosial yang nyata terlihat.

3. METODOLOGI PENELITIAN.

Penelitian ini dilakukan sekecamatan kademangan yang terbagi dalam 6 kelurahan dan yang telah dihitung angka kemiskinannya oleh kantor Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Metode penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Sedangkan, Data Sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah

berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.

Indikator Informan.

Untuk menentukan informan penelitian yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Kriteria untuk informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berusia 20 sampai 50 tahun, masyarakat yang mampu menjawab setiap pertanyaan, masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul serta menerapkannya sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi serta dampak terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Penelitian ini juga menggunakan analisis kuantitatif, dan analisis kualitatif yang digunakan yaitu informasi tentang pemberdayaan dan pembangunan ekonomi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat.

Dari hasil Pemberdayaan di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, Pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi:

- a. Perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat, merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; melaksanakan koordinasi dengan Kelurahan serta seluruh Sub-bagian dan Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi.
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya.
- c. Monitoring dan Evaluasi, Kecamatan Kademangan mengadakan monitoring bersama Lurah se-Kecamatan Kademangan dan Kasi Pemerintahan Kelurahan, Kasi Pemberdayaan masyarakat beserta staf seksi Pemerintahan. Monitoring dibuka langsung oleh Camat Kademangan Kota Probolinggo sekaligus menyampaikan pengarahan perlunya kerja sama semua pihak diwilayah Kecamatan Kademangan. Pada acara tersebut Kasi Pemerintahan Kecamatan menyampaikan penjelasan

tentang : Dihimbau kepada masing-masing Kelurahan untuk membentuk panitia pemilihan Ketua RT, RW yang sudah berakhir masa baktinya dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 124 Tahun 2018, Ketua RT, RW , LPM dan lembaga kelurahan lainnya yang sudah berakhir masa baktinya pada bulan Januari 2019 harus sudah dibentuk dan di sahkan, Laporan bulanan kegiatan Ketua RT dan RW dimasing-masing Kelurahan untuk segera direkap dan diserahkan ke Kecamatan karena untuk pencairan honorarium ketua RT, RW.

Pembangunan Ekonomi.

Pembangunan Jalan, Jalan merupakan salah satu fasilitas/sarana utama dalam mendukung kelancaran setiap kegiatan masyarakat. Pembangunan Drainase, dalam pembangunan drainase ini untuk memperlancar aliran air baik di musim kemarau maupun di musim penghujan, dan mencegah adanya luapan air ketika hujan lebat saat musim hujan. Saluran drainase merupakan bagian penting dalam sistem pengaliran air dan tata ruang antara lain : Pembangunan saluran drainase digunakan untuk mengalirkan resapan air hujan dalam lingkungan warga menuju ke badan sungai terdekat, lingkungan lebih rapi, tidak becek dan terjadi banjir, dan untuk memperbaiki tata ruang desa. Sektor Pertanian, Luas lahan pertanian di Kecamatan Kademangan sebesar 697,00 Ha. Dapat dikatakan bahwa pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan memperluas lapangan kerja, kesempatan usaha serta mengisi dan memperluas pasar.

Sektor Perdagangan, Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Perdagangan merupakan salah satu mata pencaharian penduduk Kecamatan Kademangan. Menurut Kecamatan Kademangan, fasilitas perdagangan yang ada di Kecamatan Kademangan sebagai berikut 4 unit pasar tradisional dengan bangunan permanen serta 12 buah Minimarket.

Infrastruktur, Pembangunan infrastruktur desa dengan menggunakan Dana Desa yang dikucurkan sejak tiga tahun silam terbukti mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masyarakat di perdesaan. Pendidikan, Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo mencatat pada jenjang SD/MI di Kecamatan Kademangan ada 25 sekolah, 3.880 murid, dan 251 guru. SMP/MTS ada 8 sekolah, 2.639 murid dan 185 guru. SMA Sederajat/MA ada 12 sekolah, 2.720 murid dan 224 guru.

Budaya, Dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan diperlukan keterlibatan semua unsur masyarakat yang ada. Keterlibatan ini tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah, dan harus menjadi tanggung jawab orang-orang yang berpenghasilan tinggi/kaya. Maka, untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan ini, perlu ditumbuhkan budaya. Artinya, budaya yang saling membantu/memeberi dana, sesama masyarakat.

Ketahanan Pangan, Kemiskinan erat kaitannya dengan ketahanan pangan karena kemiskinan menyebabkan keterbatasan untuk mengonsumsi pangan. Maka dengan adanya bantuan sosial yang berupa Bantuan Pangan Non Tunai, mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan masyarakat bisa mengonsumsi pangan seperti yang lain.

Tabel 1. Pembahasan Terukur Dari Hasil Informan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo 2019

NO	PEMBAHASAN DARI INFORMAN	SATUAN %
1	Pemerintahan kelurahan itu sangat terlibat dalam pembangunan di setiap kelurahan. Disamping kelurahan itu terlibat dalam kegiatan pembangunan tidak lepas juga partisipasi masyarakat di dalam pembangunan itu sangat tampak sekali seperti mengawasi, memberikan bantuan berupa tenaga, maupun partisipasi dana meskipun itu sangat rendah.	100 %
2	Sosialisasi dalam pemberdayaan masyarakat di pembangunan ekonomi itu ada, bisa dilakukan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali yang bias disebut musyawarah kelurahan (Muskel), dan juga bias dilakukan 1 tahun sekali yang disebut dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).	100 %
3	Hasilnya yang diinginkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin ini sangat merasakan sekali manfaat dari program yang dilaksanakan. Dan tidak semua 100% bisa terealisasi semua program yang diinginkan masyarakat tidak semua terealisasi karena itu juga disesuaikan dengan jumlah program dengan dana yang ada. Kemudian ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan itu di dalam ekonominya ada.	< 100 %
4	Dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri sangatlah positif, karena masyarakat bisa merasakan hasil yang mereka peroleh dari pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ini seperti bantuan-bantuan yang berupa BPNT, PKH, KUBE, dan juga pembangunan jalan, drainase, penerangan lampu di jalan dan sebagainya.	100 %

NO	PEMBAHASAN DARI INFORMAN	SATUAN %
5	<p>Faktor yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan dalam pembangunan ekonomi yaitu adanya dana dari PNPM Mandiri Perkotaan, kerjasama antara pemerintah desa dengan kepala Kelurahan setempat dan juga masyarakat.</p> <p>Faktor penghambatnya PNPM mandiri ini tidak maksimal dapat dikarenakan komitmen dan keahlian pelaksana program PNPM mandiri masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang intensif terkait program PNPM mandiri, Tahapan pengajuan bantuan usaha yang dirasa terlalu panjang dan rumit, Pelaksanaan program PNPM mandiri yang masih mengekor pada kebijakan pemerintah pusat.</p>	100 %

Sumber: Data diolah, 2023

Pembahasan

Dari paparan data hasil penelitian baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk analisis yang menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk senantiasa melakukan dan memperbaiki kegiatan sosial-ekonomi guna tercapainya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat perkotaan, sehingga mereka mampu menghasilkan nilai tambah dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya dalam memotivasi masyarakat dimana bentuknya antara lain berupa bantuan modal usaha dan pengembangan sumber daya manusia.

Dapat dilihat dari table di atas tentang pembahasan dari data informan yaitu Pemerintahan kelurahan itu sangat terlibat dalam pembangunan di setiap kelurahan. Disamping kelurahan itu terlibat dalam kegiatan pembangunan tidak lepas juga partisipasi masyarakat di dalam pembangunan itu sangat tampak sekali seperti mengawasi, memberikan bantuan berupa tenaga, maupun partisipasi dana meskipun itu sangat rendah sehingga memiliki nilai 100% karena tanpa melibatkan partisipasi dari masyarakat, maka pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal serta masyarakat juga ikut berpartisipasi secara sukarela tanpa dipaksa dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan.

Sosialisasi dalam pemberdayaan masyarakat di pembangunan ekonomi itu ada, bisa dilakukan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali yang bisa disebut Musyawarah Kelurahan (Muskel), dan juga bisa dilakukan 1 tahun sekali yang disebut dengan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki nilai 100% karena sosialisasi itu penting dilaksanakan untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan setiap ada kegiatan sosial maupun kegiatan yang lain tentunya selalu diadakan sosialisasi dalam pengembangan ekonomi, tanpa di sosialisasikan maka nantinya masyarakat tidak akan tau dengan adanya pembangunan di setiap kelurahan. Yang dikatakan dengan Musyawarah Kelurahan itu adalah pertemuan perwakilan warga desa untuk membahas hasil survey dilapangan dan merencanakan penanggulangan masalah, yang dihadiri oleh ketua RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Lurah, Fasilitator, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) serta perwakilan dari masyarakat. Sedangkan yang dikatakan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yaitu forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu/memperhatikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMkel) yang telah disusun untuk 5 tahun kedepan.

Hasil yang diinginkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin ini sangat merasakan sekali manfaat dari program yang dilaksanakan. Dan tidak semua 100% bisa terealisasi semua program yang diinginkan masyarakat karena itu juga disesuaikan dengan jumlah program dengan dana yang ada, memiliki nilai <100 % karena tidak semua hasil yang diinginkan oleh masyarakat itu ada yang tidak sesuai dengan keinginan dan ada juga yang sudah memenuhi keinginan.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri sangatlah positif, karena masyarakat bisa merasakan hasil yang mereka peroleh dari pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ini seperti bantuan-bantuan yang berupa BPNT, PKH, KUBE dan juga pembangunan jalan, drainase, penerangan lampu di jalan dan lain sebagainya, memiliki nilai 100% karena bantuan-bantuan tersebut yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin dan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan dan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (Fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai di dorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan melalui PKH, Keluarga Miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses

terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Bantuan yang berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di Kecamatan kademangan sebanyak 3.101 orang. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu salah satu program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial RI khususnya di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP), jadi masyarakat yang memiliki usaha berkembang dan juga memiliki buku catatan keuangan bisa mengikuti keanggotaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), setiap KUBE beranggotakan 10 KK dan anggota berusia antara 15 tahun sampai 55 tahun dan sudah berkeluarga. Sehingga bantuan tersebut bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga mengurangi kemiskinan.

Faktor yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan dalam pembangunan ekonomi yaitu adanya dana dari PNPM Mandiri Perkotaan, kerjasama antara pemerintah desa dengan kepala Kelurahan setempat dan juga masyarakat dan Faktor penghambatnya PNPM mandiri ini tidak maksimal dapat dikarenakan komitmen dan keahlian pelaksana program PNPM mandiri masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang intensif terkait program PNPM mandiri, Tahapan pengajuan bantuan usaha yang dirasa terlalu panjang dan rumit, Pelaksanaan program PNPM mandiri yang masih mengekor pada kebijakan pemerintah pusat, mempunyai nilai 100% memang ada faktor pendukung dan penghambat di kegiatan pembangunan setiap kelurahan.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsiyah. 2009. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. Wacana, Vol. 12 No. 2, April 2009, ISSN. 1411-0199.
- Bakri, Masykuri., M.Si., (Ed). 2011. Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA dan PRA. Surabaya: Visipress Media.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

- Huraerah, Abu., M.Si. 2011. Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat; Model & Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- Indrajit, Wisnu VO dan Soimin, SH., M.Hum. 2014. Pemberdayaan Masyarakat & Pembangunan, Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memeutus Mata Rantai Kemiskinan. Malang, Jatim: Intrans Publishing.
- Irawan, M.B.A, Suparmoko. M.A., Ph.D. 2011. Ekonomika Pembangunan. Jakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Rosyidi, Suherman. 2009. Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, Phd. 2013. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. 2013. Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya. Malang: In-Trans Publishing.
- Syahril Sayed, Dkk. 2015. Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dn Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume.3, No. 2. Mei 2015. ISSN. 2302-0172.
- Tim Dosen FE UPM Probolinggo. 2018/2019. Pedoman Penulisan Skripsi. Probolinggo: Fakultas Ekonomi Universitas Panca Marga Probolinggo.
- Tukasno. 2013. Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Melalui Proses Pengembangan Kapasitas (Studi Di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur). Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3, No. 2 April 2013. ISSN. 2087-0701.